

**MODEL ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN WIRUSAHA BERBASIS
TRIPLE HELIX : PERAN PERGURUAN TINGGI VOKASI
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

**Mochamad Sarif Hasyim, Zabrina Ardelia, Sansafury K Dini,
Doni Mardiyanto, Adi Masliardi**

Politeknik Ketenagakerjaan
Email : sarifhasyim@polteknaker.ac.id

Abstract

This research is qualitative field research with the application of the triple helix concept for the training and development needs analysis model to encourage the development of entrepreneurs in Gunung Putri Village, Gunung Putri District, Bogor Regency. This study also explains the methods to be used in training and development and the benefits obtained from training and development, including supporting and inhibiting factors in training and development. This concept refers to a series of interactions between vocational colleges/academies, the government and industry, namely entrepreneurs. The role of academics, in this case the Politeknik Ketenagakerjaan is as a driver in entrepreneurial development through training programs specifically designed based on the needs of entrepreneurs to improve knowledge and skills. By providing appropriate training, academics help improve the capabilities and competencies of entrepreneurs in managing their businesses well. The government supports through adequate policies and infrastructure, while MSMEs must be proactive in adopting digital technology and developing effective marketing strategies. With good cooperation, the triple helix system can create a conducive ecosystem for MSME growth, increase competitiveness, and encourage economic progress in Gunung Putri Village and other regions in Indonesia. Data collection methods be used include observation, interviews, and questionnaires.

Keywords: *Training Needs Analysis, Gunung Putri Village, Politeknik Ketenagakerjaan, Triple Helix, Entrepreneurship*

1. PENDAHULUAN

Sudah menjadi fakta yang diterima secara luas bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di banyak negara. Hal ini didukung oleh banyak peneliti seperti Holcombe (1995), Khandker (1998), Otero dan Rhyne (1994), dan Remenyi (1991) dalam jurnal Zahiruddin, A., Md, Y., Othman, S., Latiff, A., & Shamsuri, S. (2012) di mana mereka sepakat bahwa UMKM dianggap sebagai "mesin penggerak" pertumbuhan ekonomi dan karenanya, bertindak sebagai stimulan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di tingkat nasional. Meskipun krisis ekonomi telah menghancurkan perusahaan besar, jelas bahwa usaha usaha kecil dan menengah tetap kuat dan berkembang di eselon kehidupan perekonomian yang lebih rendah (Glendoh, 2001). Wirausaha dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan sentral dalam perekonomian Indonesia sebagai kegiatan perekonomian nasional. Di Indonesia usaha mikro kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian, jumlahnya mencapai 8,7 juta pada tahun 2022, terbesar ada di provinsi Jawa Barat dan diperkirakan meningkat pada tahun 2024 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan program penciptaan 100 ribu wirausaha baru yang secara resmi ditetapkan dalam peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 58

tahun 2014 tentang Pedoman Penciptaan 100 ribu wirausaha baru. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan jumlah wirausaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing dan mengurangi pengangguran. Hal ini sejalan dengan salah satu misi kabupaten Bogor yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi. Misi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor juga diimplementasikan pada tingkat pemerintah desa di Gunung Putri dengan menerapkan program sistem pelayanan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi (Damanhuri, 2023). Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan adalah dukungan terhadap wirausaha industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan.

Sebagai sumber ilmu akademik, kontribusi serta inovasi di perguruan tinggi berperan untuk merealisasikan proyek penelitian, mentransfer ilmu dan menerapkan ilmu tersebut kepada masyarakat. Dimungkinkan juga untuk mentransfer pengetahuan ke industri dan pemerintah. Badan-badan pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat energi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan '*triple bottom line*' yaitu warga negara, bumi, dan keuntungan (Silvius & Schipper, 2014). Dalam transisi menuju masyarakat berbasis pengetahuan, universitas mempunyai peran lebih besar dalam membangun platform pembangunan ekonomi. Peran baru ini terkadang disebut "misi ketiga", yang tidak berdiri sendiri (Etzkowitz, 2011). Sebagai aktor utama yang paling utama, dukungan yang diberikan oleh kebijakan pemerintah dapat menjadi katalis pertumbuhan kewirausahaan yang dalam dukungannya dapat menjadikan UKM berkelanjutan (Nugroho, 2015).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebutuhan Pelatihan (*Training Need Analysis-TNA*)

Penilaian kebutuhan adalah suatu diagnosa untuk menentukan masalah yang dihadapi saat ini dan tantangan di masa mendatang yang harus dapat dipenuhi oleh program pelatihan dan pengembangan (Veithzal Rivai, dkk.2015). Dimana kebutuhan dapat digolongkan menjadi tiga (3) yaitu:

1. Kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang
2. Memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya
3. Untuk memenuhi tuntutan perubahan

Wirausaha

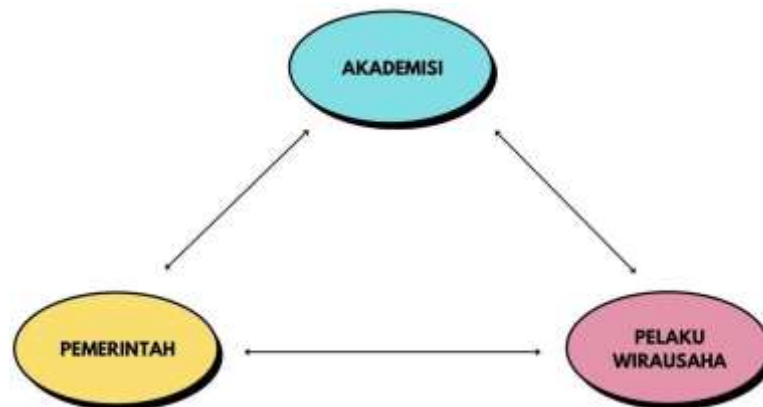
Wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasaknya serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi (Ilahi, 2023). Pelaku wirausaha harus memiliki sikap perilaku dan kemampuan kreatif inovatif dalam mencari peluang serta menjadikannya sebagai usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan mengelola resiko dan hasil untuk diri dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Triple Helix

Merupakan interaksi antara akademisi, industri dan pemerintah yang dikembangkan oleh Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff. Konsep ini sering digunakan sebagai kerangka normatif antara peneliti untuk pemahaman interaksi antara aktor kunci dalam inovasi sebuah

sistem. *Triple helix* digunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini sekaligus *frame* untuk melihat bagaimana ketiga aktor saling terhubung. Secara sederhana (Rufaidah, 2015) mendefinisikan Triple Helix sebagai kolaborasi dinamis antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Vaivode menyatakan bahwa dalam triple helix terdapat aktor aktor kunci yang berperan dalam suatu jaringan hubungan, yaitu perguruan tinggi (sains), industri (bisnis) dan pemerintah (pemerintahan) (Vaivode, 2015).

Perkembangan pendekatan triple helix telah menghasilkan beberapa konfigurasi (Rufaidah, 2015), yaitu pada Konfigurasi pertama *statist regime* dimana pemerintah memainkan peran sebagai pengarah yang mendorong akademisi dan industri; Konfigurasi kedua, disebut *laissez-faire regime*, dimana industri adalah kekuatan pendorong dengan dua pihak lainnya sebagai struktur pendukung pelengkap (*ancillary support structure*); Konfigurasi ketiga, disebut sebagai *balance model* yaitu melibatkan peran ketiga pihak sehingga tercipta masyarakat berbasis pengetahuan; universitas dan institusi lainnya memerankan peran aktif dalam kemitraan dengan industri dan pemerintah, bahkan dalam pembentukan inisiatif bersama (*joint initiatives*). Etzkowitz & Leydesdorff, 1997 menekankan bahwa model *triple helix* dapat menjadi strategi penting dalam agenda inovasi nasional atau multinasional di era baru. Sebagai model ekonomi berbasis pengetahuan, konsep triple helix memberikan model proses transformasi di antara pendidikan tinggi, dunia usaha swasta dan pemerintah (Etzkowitz, 1998, 2014; Etzkowitz & Viale, 2010; Leydesdorff, 2012; Leydesdorff & Meyer, 2006). Masing-masing gagasan helix mempunyai peran dan kepentingan yang berbeda-beda dalam mendorong inovasi, yang disebut dengan efek Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Ranga, Miedema, & Jorna, 2008).



Gambar 1. Sinergi *Triple Helix*

Sumber: Henry Etzkowitz, 2008

Penerapan *triple helix* dalam pengembangan wirausaha dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peran Akademisi: Melakukan pelatihan desain, teknologi produksi, kewirausahaan, marketing, menggiatkan riset dan peningkatan kualitas bahan baku, memberantas tiga buta: buta bahasa inggris, buta komputer dan buta internet.
2. Dunia Bisnis/Wirausaha: (*Self-development*) mengembangkan kapasitas usaha dengan cara mengikuti sosialisasi, mengikuti *workshop* desain, produksi, komersialisasi dan mekanisme pembiayaan, melakukan sistem lokomotif-gerbong dari pengusaha besar ke pengusaha kecil.
3. Pemerintah: Menerbitkan regulasi yang pro industri kreatif, memfasilitasi promosi dalam negeri dengan melakukan pameran, penghargaan kepada pelaku wirausaha, melakukan revitalisasi bahan baku, mengintensifkan bantuan modal usaha.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, sumber data dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait konsep triple helix dan para pelaku wirausaha di Desa Gunung Putri. Pengambilan sampel wawancara menggunakan purposive sampling, sedangkan responden kuesioner diambil dari keseluruhan jumlah populasi.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, analisis data dan penyajian data. Reduksi data dalam hal ini data yang diperoleh disederhanakan dan dicari yang paling sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis data, digunakan sebagai analisis dari berbagai literatur atau sumber data yang sudah dikumpulkan berkaitan dengan model pelatihan dan pengembangan berbasis triple helix di pelaku wirausaha di Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Penyajian data, data yang telah dikumpulkan akan disajikan sesuai metode mengenai fenomena tertentu yang sedang diteliti.

4. PEMBAHASAN

Peran perguruan tinggi sangatlah penting bagi pembangunan masyarakat di era masa kini. Menurut Effendi (2003), masyarakat saat ini banyak mempercayakan institusi pendidikan terutama perguruan tinggi dalam memberikan kekuatan moral dan menjadi role model bagi masyarakat di era transformasi global. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong kewirausahaan. Rasyid (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa agar UKM dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional, perlu adanya perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan penguatan UKM dengan dukungan pemerintah dan pihak terkait.

Penyelenggaraan *triple helix* di wilayah Gunung Putri mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, pertumbuhan komunikasi, telekomunikasi, dan sistem digital yang didukung oleh PT Telkom Indonesia dan PT Shopee International Indonesia. PT Telkom telah mendirikan Rumah Kreatif BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan taraf wirausaha agar semakin modern dan melek teknologi dalam menghadapi tantangan perekonomian. Kemudian PT Shopee International Indonesia bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor memberikan pelatihan digital marketing bagi wirausaha mikro di Kabupaten Bogor. Selain itu, Kepala Desa Gunung Putri bersama dengan masyarakat setempat melakukan perencanaan desa digital yang dilakukan secara mandiri dengan kolaborasi bersama anak muda yang mensinkronisasikan android tv desa dengan disambungkan di 64 titik desa termasuk internet desa, website desa, penyediaan aplikasi berbasis web (*web base*), Pojok Baca Digital (POJADI), dan Tiang Pintar. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor juga telah memberikan bentuk dukungan untuk pengembangan digitalisasi UKM seperti program UMKM Berprestasi dengan kriteria : bagaimana kolaborasi usaha dengan digital, omset penjualan, legalitas yang dimiliki, dan dampak bagi masyarakat serta lingkungan luas. Dilanjutkan dengan Dinas Koperasi & UKM kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Bogor juga memberikan apresiasi dalam bentuk bantuan permodalan dan program haji kepada para pelaku UKM naik kelas.

Kedua, penerapan Triple Helix pada industri kreatif khusus kerajinan, seni, dan fashion berdasarkan rencana pengembangan industri kreatif Indonesia. Terdapat tujuh belas subsektor yang termasuk pengembangan industri kreatif yaitu : pengembang permainan, kriya, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fasion, kuliner, film, animasi, dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, seni pertunjukan, periklanan, arsitektur, penerbitan, aplikasi (Kemenparekraf, 2019).

Ketiga, pemerintah provinsi telah mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat koperasi dan UKM dengan memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada koperasi dan UKM untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan meningkatkan pendapatan daerah. Setidaknya terdapat tujuh layanan pengelolaan Pusat Pelayanan Bisnis Terpadu di antaranya konsultasi bisnis, pendampingan atau mentoring bisnis, promosi atau pemasaran, IT dan *e-commerce*, akses sumber pembiayaan, pelatihan bisnis, *networking* dan kemitraan bisnis, materi proposal dan layanan perpustakaan wirausaha. Selain itu juga Bupati Kabupaten Bogor juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang mana penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan untuk salah satunya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. TJSLP yang dimaksud adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan taraf hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat umumnya (Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tentang TJSLP, 2023).

Wirausaha memiliki sumber daya terbatas untuk mengembangkan dan mempertahankan kinerjanya serta meningkatkan kualitas produk. Wirausaha sangat membutuhkan kolaborasi dengan sektor lain untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, dengan penggabungan agen triple helix akan memberikan kontribusi yang signifikan. Dari sisi sektor industri, (Brink dan Madsen, 2016) mengungkapkan bahwa UKM wajib memperoleh akses pasar dan mitra industri untuk mengenali, mempelajari, dan memilih peluang inovasi bisnis. Pemerintah perlu secara aktif mengembangkan bisnis lokal melalui penyediaan pelatihan masyarakat, peningkatan produksi UKM, dan suku bunga rendah. Kemudian dari sisi pemasaran, Wirausaha perlu didorong untuk di menggenjot penjualan online dan menyelaraskannya dengan penjualan konvensional. Di dalam konteks pengembangan UKM, khususnya di desa Gunung Putri, sistem ini berperan penting dalam mendorong transformasi digital dan meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Peran Perguruan Tinggi (Politeknik Ketenagakerjaan)

Kolaborasi perguruan tinggi merupakan faktor penting dalam mendorong siklus kemampuan berwirausaha masyarakat. Peran akademisi dalam memajukan UMKM di suatu daerah bergantung pada seberapa besar pemerintah daerah melibatkan mereka dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. Hal ini diperkuat oleh studi UMKM yang dilakukan oleh Halibas, Sibavan & Maata (2017), menyoroti tentang peran akademisi dalam memajukan pengetahuan ekonomi di masyarakat yang difokuskan pada penyediaan tenaga kerja terampil. Dalam sudut pandang pelaku wirausaha, akademisi dapat berperan secara proaktif menjembatani pelaku wirausaha, memberikan pelatihan, inkubator bisnis dan sebagainya. Namun, disisi lain keterlibatan akademisi sangatlah penting bagi pemerintah karena pemerintah daerah membutuhkan panduan dan rekomendasi untuk program pengembangan potensial yang ditujukan untuk pelaku wirausaha. Kehadiran institusi perguruan tinggi sekitar desa Gunung Putri seperti Politeknik Ketenagakerjaan dan kampus lainnya merupakan kontributor yang signifikan bagi pelaku wirausaha di gunung putri. Kombinasi antara keahlian dan pengetahuan para profesional akademisi menjadi kekuatan utama dalam memajukan ilmu pengetahuan. Artinya, akademisi diharapkan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan dan inovasi baru yang memfasilitasi penerapan kebijakan sehingga dapat diterapkan oleh pelaku wirausaha. Upaya kolaboratif yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi, pemerintah dan pelaku wirausaha dapat memberikan dorongan pembangunan sosial-ekonomi daerah. Peran akademisi dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan berbagai langkah seperti :

- Riset kebutuhan pelatihan

Akademisi dapat berkontribusi dalam melakukan riset dan pengembangan yang berfokus pada sektor wirausaha di Desa Gunung Putri, melalui studi untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang yang dihadapi sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan pelaku wirausaha. Dalam hal ini Politeknik Ketenagakerjaan menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam mendukung dan memberdayakan potensi yang ada di Desa UMKM Gunung Putri.

Kesadaran ini mendorong Politeknik Ketenagakerjaan untuk mengambil langkah konkret dalam mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan oleh desa gunung putri. Untuk mencapai tujuan ini, polteknaker menggunakan pendekatan *Triple Helix*, yang melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan di Desa Gunung Putri. Politeknik Ketenagakerjaan memahami bahwa pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan lokal adalah kunci untuk merancang program yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Politeknik Ketenagakerjaan memutuskan untuk mengunjungi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor. Kunjungan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam mengenai berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dijalankan di Desa Gunung Putri. Melalui kolaborasi ini, Politeknik Ketenagakerjaan memperoleh informasi berharga tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dan program-program yang mungkin masih diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM di desa gunung putri melalui *training need analysis*. Training Need Analysis (TNA) adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pelatihan dalam suatu organisasi atau komunitas. Dalam konteks ini, TNA dilakukan untuk menentukan jenis pelatihan yang paling relevan dan efektif bagi pelaku wirausaha di Desa Gunung Putri. Proses TNA melibatkan berbagai langkah, termasuk pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan penentuan prioritas pelatihan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi tentang keterampilan yang dimiliki oleh pelaku wirausaha saat ini, kesenjangan keterampilan yang ada, serta kebutuhan dan harapan mereka terhadap pelatihan. Analisis ini melibatkan wawancara, survei, dan observasi langsung di lapangan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan mencerminkan kondisi nyata.

Hasil dari TNA ini digunakan untuk merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM di Desa Gunung Putri. Program pelatihan ini dapat mencakup berbagai topik, seperti manajemen bisnis, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan keterampilan teknis yang relevan dengan jenis usaha yang ada di desa tersebut. Dengan demikian, pelatihan yang diberikan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga lebih efektif dan bermanfaat bagi para pelaku wirausaha. Selain itu, Politeknik Ketenagakerjaan juga langsung terjun ke lapangan dengan mendatangi beberapa pelaku wirausaha di Desa Gunung Putri. Dengan mengambil beberapa pelaku wirausaha sebagai sampel, Politeknik Ketenagakerjaan dapat memperoleh wawasan langsung mengenai pengalaman dan kebutuhan nyata dari para pelaku usaha. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami secara lebih mendetail program-program yang pernah diterima oleh para pelaku wirausaha serta mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi.

- Kerjasama dengan pemerintah

Setelah dilakukan analisa kebutuhan pelatihan, akademisi dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat. Pemerintah menjadi jembatan antara akademisi dan pelaku wirausaha melalui pemberian fasilitas, sarana dan komunikasi. Keterlibatan pemerintah dalam menjalankan pelatihan dapat mendorong keberlangsungan aktivitas.

- Pendidikan dan Pelatihan

Kontribusi akademisi dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku wirausaha di desa Gunung Putri dapat dilakukan melalui implementasi kurikulum atau program pelatihan yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pelatihan pelaku wirausaha, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan wirausaha. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang relevan upaya ini dapat berkontribusi pada peningkatan kapabilitas dan kompetensi pelaku wirausaha.

- Monitoring

Setelah pelatihan, akademisi dapat melakukan monitoring supaya memastikan pelatihan yang diberikan dapat diimplementasikan dan diterapkan oleh pelaku wirausaha. Keterlibatan akademisi dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku wirausaha dapat dilakukan melalui perancangan bisnis, pemilihan strategi pemasaran, manajemen keuangan, pembukuan digital dan aspek operasional lainnya yang dapat membantu seluruh pelaku wirausaha untuk mengatasi berbagai tantangan dan memaksimalkan potensi mereka. Perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan serangkaian pengabdian kepada masyarakat yang menjadi manifestasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan guna mencapai kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 47 dan 48 Undang-undang nomor 12 tahun 2012). Sehingga, dalam sinergi *triple helix* terjadi simbiosis mutualisme antara perguruan tinggi dengan pelaku wirausaha dan pemerintah. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, akademisi perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis yang berharga bagi pelaku wirausaha desa Gunung Putri. Kontribusinya dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing pelaku wirausaha, serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan, akan sangat bermanfaat bagi kemajuan pelaku wirausaha dan perekonomian daerah.

Peran Pemerintah (Dinas Koperasi dan UMKM)

Dalam sinergi *triple helix*, pemerintah menjadi titik tumpu membuat regulasi yang dapat diimplementasikan secara efektif antara akademisi dan pelaku wirausaha. Keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor sebagai pemerintah berperan dalam membina hubungan kolaboratif di antara sektor akademisi dan pelaku wirausaha serta membuat serangkaian regulasi beserta program yang dapat diterapkan oleh seluruh pelaku wirausaha yang berada di kabupaten Bogor. Program kegiatan dinas dituangkan lebih rinci dalam sub kegiatan menggunakan analisa kebutuhan pelaku wirausaha. Menurut Yudi Taufik, Kepala Bidang Pemberdayaan Struktur Mikro, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor hingga saat ini terdapat dua program optimalisasi pelaku wirausaha yaitu pemberdayaan dan pengembangan, pemberdayaan merupakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Pasal 1, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008). Pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memperkenalkan para pelaku wirausaha dengan toko modern yang diharapkan dapat bekerja sama melalui kurasi produk. Sedangkan pengembangan pelaku wirausaha adalah suatu proses yang berkelanjutan dan terarah untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha dalam aspek manajemen, pemasaran, teknologi, dan akses permodalan agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Mardiasmo, 2004). Pada pengembangan berwirausaha dinas koperasi dan umkm menjembatani pelaku wirausaha dengan instansi swasta dan akademisi untuk melaksanakan pelatihan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelaku wirausaha diantaranya pelatihan

penumbuhan kewirausahaan baru, diversifikasi produk, pelatihan digital marketing, kemasan, dan sebagainya. Dengan adanya dua program tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan di setiap kecamatan dengan Forum UMKM melalui rapat bulanan yang diadakan setiap satu bulan sekali. Forum tersebut bertujuan sebagai pemantauan program, penyampaian aspirasi, dan menganalisa kebutuhan pelaku wirausaha di setiap kecamatan. Hingga saat ini kebutuhan pelaku wirausaha kabupaten Bogor adalah peningkatan sumber daya, sistem pemasaran dan transisi pelaku wirausaha untuk masuk ke jangkauan pasar modern (Yudi Taufik, 2024).

Peran Pelaku Wirausaha

Pelaku wirausaha sendiri, sebagai bagian ketiga dalam model ini, harus menyadari pentingnya literasi digitalisasi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Dalam mengembangkan bisnis, pelaku wirausaha harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi (Rachma Rizqina, 2024). Banyak pelaku usaha di Gunung Putri yang masih menjalankan bisnis mereka secara konvensional dan *door-to-door*, sehingga menghadapi keterbatasan dalam hal akses pasar dan efisiensi operasional. Misalnya usaha singkong milik ibu Titik yang merupakan usaha potensial untuk menjangkau pasar lebih luas. Sebagai produsen tangan pertama, bu Titik memiliki berbagai hambatan seperti bahan baku, pemasaran digital dan pembukuan. Dengan dukungan dari Politeknik Ketenagakerjaan sebagai akademisi dan pemerintah, pelaku wirausaha perlu mengadopsi media sosial dan *platform e-commerce* sebagai alat utama dalam pemasaran dan penjualan produk mereka. Kesadaran terhadap pentingnya digitalisasi dan pengelolaan *brand awareness* menjadi kunci untuk menarik lebih banyak konsumen dan membangun reputasi yang kuat.

5. KESIMPULAN

Hasil analisis kebutuhan pelatihan dengan model triple helix menunjukkan bahwa diagnosa kebutuhan adalah untuk memenuhi tuntutan perubahan. Hal tersebut ditinjau dari tiga faktor pendorong pelaku wirausaha yaitu (1) faktor personal, masyarakat desa Gunung Putri memiliki motivasi dalam memulai usaha yang disebabkan beberapa faktor seperti tidak ada penghasilan tetap, terkena dampak PHK, kebutuhan keluarga meningkat, dan keinginan mandiri dengan membangun usaha sendiri sehingga sebagian besar warga memutuskan untuk menjadi pelaku wirausaha. (2) faktor lingkungan, eksistensi desa Gunung Putri sebagai desa digital, berdampak pada pelaku wirausaha untuk beradaptasi dengan dunia digital. Keberadaan faktor tersebut mempengaruhi pelaku wirausaha yang membutuhkan pelatihan berbasis digital untuk memudahkan melakukan pemasaran. (3) faktor sosial, pelaku wirausaha desa Gunung Putri sekitar 17-60 tahun, dengan rentang usia yang tentatif sulit menerima dan mengimplementasikan informasi terutama terkait dengan dunia digital.

Dengan demikian, peran *triple helix* ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan UMKM secara individu, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi desa secara keseluruhan. Para pelaku usaha di Gunung Putri belum sepenuhnya terdigitalisasi. Banyak dari mereka masih menjalankan usahanya secara konvensional dan *door-to-door*. Metode ini menyebabkan beberapa kendala signifikan dalam perkembangan bisnis mereka. Tanpa pemanfaatan teknologi digital, pelaku usaha kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas dan berpotensi kehilangan peluang besar dalam meningkatkan laba serta mengembangkan brand mereka.

Institusi pendidikan, dalam hal ini Politeknik Ketenagakerjaan (Politeknaker), berfungsi sebagai penghubung yang menjembatani antara pemerintah dan pelaku UMKM. Peran ini sangat krusial karena institusi pendidikan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik nyata, serta menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan berkompoten. Politeknaker berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM, mengembangkan program pelatihan yang relevan, dan memberikan bimbingan teknis yang

diperlukan. Selain itu, institusi pendidikan ini juga bertugas untuk menyebarkan penelitian dan inovasi yang dapat diadopsi oleh UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk serta layanan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasya, Annisa. 2023, 8 Juli. Data UMKM Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Diakses 13 April 2024 pukul 19.50 wib. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/>
- Badan Pusat Statistik. 2023, Agustus. [Keadaan-ketenagakerjaan-kabupaten-bogor-agustus-2023](https://bogorkab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/27/239/). Diakses 12 April 2024 pukul 15:10 WIB. <https://bogorkab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/27/239/>
- Etzkowitz, Henry. 2008. *The triple helix: university-industry-government innovation*, Taylor & Francis e-Library. New York.
- Glendoh, Sentot Harman. 2001. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.3 no 1, Maret 2001
- Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). The penta helix model of innovation in Oman: An HEI perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12, 159-172. Retrieved from <http://www.informingscience.org/Publications/3735>
- Ilahi, Andi Alfianto Anugrah. 2023. *Kewirausahaan*, Cetakan Pertama Purbalingga, Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Limanseto, H. (2023, August 24). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Retrieved July 31, 2024, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- Pattimahu, T. V., Lewaherilla, N. C., & Pentury, G. M. (n.d.). Model Pengembangan UMKM Berbasis Triple Helix: Tendensi Peran Akademisi Perguruan Tinggi. *Journal on Education*, 06(01), 3143–3152.
- Pemerintah Pusat. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). (2023)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah. (2019)
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 tahun 2014 tentang Pedoman Pencetakan Seratus Ribu Wirauasaha baru. (2014)

- RI, K. K. (2023, Agustus 24). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasif>: ekon.go.id
- Rufaidah, Popy. 2015. Branding Strategy Berbasis Ekonomi Kreatif: *Triple Helix Vs Quadruple Helix*. *Researchgate*, (July). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4132.7208>
- Simamora, Henry.2004. Manajemen Sumber Daya Manusia/Henry Simamora, Edisi ke-3, Cetakan ke-1, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.Yogyakarta.
- Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012)
- Vaivode, I. 2015. Trple Helix Model of University-Industry-Goverment Cooperation in the Context of Uncertainties. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 213, 1063-1067. <https://doi.org/10/1016/j.sbspro.2015.11.526>
- Veithzal Rivai Zainal, dkk. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan:Dari Teori ke Praktik, Edisi 3 cetakan ke-7. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zahiruddin, A., Md, Y., Othman, S., Latiff, A., & Shamsuri, S. (2012). The Impact of Training on Small and Medium Enterprises (SMEs) Performance. In *Journal of Professional Management* (Vol. 2, Issue 1).